

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembelajaran dapat diartikan sebuah mekanisme di mana siswa berpartisipasi dalam berbagai aktivitas pendidikan. Hal ini bertujuan untuk mendorong siswa untuk terus mengembangkan potensi terbaik mereka selama kegiatan belajar dan mengajar. Guru mengemban peran yang sangat penting dalam menumbuhkan keterampilan pengetahuan, perasaan dan mental. Pembelajaran ialah kegiatan yang memfasilitasi siswa untuk terlibat dalam pendidikan, seperti yang dikatakan Hanafy (2014, hlm. 74). Proses pembelajaran melibatkan guru dan siswa yang berinteraksi di ruang kelas untuk meningkatkan berbagai keterampilan.

Sedangkan itu, pendidikan adalah usaha terencana dan sadar untuk menciptakan berbagai aktifitas pembelajaran. Pendidikan yang bermutu dapat memajukan sebuah bangsa. Proses pembelajaran di sekolah tidak terlepas dari pengaruh pendidikan. Saat ini kondisi pendidikan dihadapkan pada banyak hambatan rumit. Satu diantaranya adalah bagaimana mempersiapkan guru untuk mengikuti kemajuan teknologi dan kebutuhan abad ke-21 (Aspi, 2022, hlm. 64–73). Maka dari itu, pentingnya pendidikan dalam konteks masyarakat tidak dapat dipandang sebelah mata, setiap individu berhak atas pendidikan yang memenuhi kebutuhan dan standar yang memadai. Pendidikan perlu diselaraskan dengan tuntutan masyarakat agar dapat memenuhi tujuan yang diharapkan dalam Undang-Undang Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003.

Kurikulum memiliki peranan yang sangat besar dan tidak bisa diabaikan, karena memiliki andil besar dalam pendidikan dengan mengarahkan seluruh proses pendidikan untuk memastikan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan (Ni'am, 2022, hlm. 66-75). Kurikulum terdiri dari serangkaian rencana pembelajaran yang memuat tujuan, materi yang diajarkan, kegiatan yang dirancang, waktu pelaksanaan, serta metode

evaluasi dan berfungsi sebagai dasar untuk mencapai tujuan pendidikan (Sulaiman, 2022, hlm. 3752-3760).

Yusuf (2015, hlm. 13) berpendapat, kurikulum dalam pengertian dasar dapat diartikan sebagai instrumen dalam pelaksanaan pendidikan. Kurikulum berperan sebagai dasar untuk kegiatan belajar di sekolah, tidak bukan sekedar dokumen formal, tetapi juga sebagai instrument dan referensi bagi pendidik dalam melaksanakan pendidikan yang berkualitas dan memenuhi sasaran pendidikan nasional. Dengan kurikulum yang berfungsi sebagai dasar yang kuat untuk pelaksanaan pendidikan, maka kurikulum membantu pendidik di semua tingkatan, dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi dalam melaksanakan pendidikan.

Saat ini, sistem pendidikan yang ada di Indonesia telah melalui beberapa transformasi dan penyempurnaan. Ini termasuk pembaruan yang dilakukan pada tahun 1947, 1964, 1968, 1973, 1975, 1984, 1994, 1997 (pembaruan kurikulum tahun 1994), Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) pada 2004, dan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) pada 2006. Di tahun 2013, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Nasional melakukan pergantian kurikulum 2013 ke kurikulum Kurtilas. Kemudian, di tahun 2018, kurikulum tersebut diubah menjadi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Saat ini munculah kurikulum baru yaitu kurikulum merdeka.

Kemunculan adanya pandemi COVID-19 menjadi salah satu momen krusial yang menyebabkan perubahan dalam keberlanjutan pendidikan, terutama di Indonesia. Kondisi darurat pandemi memperparah krisis pembelajaran. Ini berdampak besar pada pendidikan. Karena itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi membuat kurikulum mandiri untuk mengatasi masalah sistem pendidikan. Ketertinggalan pembelajaran selama pandemi sebagian mendorong inisiatif ini. Akibatnya, sistem pendidikan harus disesuaikan dengan kebijakan baru untuk memenuhi tujuan pembelajaran (Nafrin & Hudaidah, 2021, hlm. 456-462).

Kurikulum merdeka dapat diartikan sebagai kerangka pembelajaran yang dirancang agar siswa dapat menampilkan kemampuan bakat alami mereka dan belajar dalam suasana yang damai, menyenangkan, dan tanpa tekanan. Kurikulum ini dikembangkan sebagai jawaban atas kebutuhan akan perubahan yang bertujuan agar mutu pendidikan di Indonesia dapat ditingkatkan dan sejalan dengan tuntutan era yang terus berkembang.

Oleh sebab itu, konsep kebebasan belajar memerlukan pembebasan sistem pendidikan dari kendala yang menghalangi pendidik dan siswa untuk mengekspresikan kreativitas mereka dalam memupuk bakat dan minat mereka. Dengan demikian, pembelajaran mandiri ini memfasilitasi siswa dalam memilih mata pelajaran yang mereka gemari untuk memaksimalkan potensi mereka dan berkontribusi kepada bangsa melalui prestasi dan usaha mereka. Selain itu, para pendidik diarahkan untuk mengembangkan potensi siswa. Kurikulum ini memungkinkan proses pembelajaran berlangsung tanpa batasan baik di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah, melainkan mendorong guru dan siswa untuk menunjukkan kreativitas dalam upaya pendidikan mereka (Manalu dkk., 2022, hlm. 80-86).

Beberapa peraturan yang mendukung pelaksanaan Kurikulum Merdeka: (1) Permendikbudristek Nomor 5 Tahun 2022, membahas mengenai Standar Kompetensi Lulusan, (2) Permendikbudristek Nomor 7 Tahun 2022, berfokus pada Standar Isi, (3) Permendikbudristek Nomor 262/M/2022, menjelaskan mengenai struktur Kurikulum Merdeka, (4) Keputusan Kepala BSKAP Nomor 008/H/KR/2022, menetapkan capaian pembelajaran, (5) Keputusan Kepala BSKAP Nomor 009/H/KR/2022, menguraikan dimensi, elemen, dan sub elemen profil mahasiswa Pancasila, dan (6) Surat Edaran Nomor 0574/H3/SK.02.01/2023, memberikan Pedoman mengenai Implementasi Kurikulum dalam Konteks Pemulihan Pembelajaran.

Terdapat 153.621 sekolah yang terdaftar sudah melaksanakan Kurikulum Merdeka pada tahun akademik 2023/2024. Jika dibandingkan dengan tahun ajaran sebelumnya, terdapat 256.568 sekolah yang

berpartisipasi secara keseluruhan, angka ini menunjukkan peningkatan yang cukup besar. Menurut data tersebut, Kurikulum Merdeka secara aktif diadopsi dan diimplementasikan di 66,26 persen sekolah di seluruh Indonesia (Ditjen GTK, Kemendikbudristek, 2023).

Bagi lembaga pendidikan yang memutuskan untuk menjalankan Kurikulum Merdeka pada periode akademik 2023/2024, terdapat tiga cara untuk melaksanakannya: (1) Mandiri Belajar, kurikulum satuan pendidikan yang sedang dilaksanakan tetap digunakan, namun sebagian dasr-dasar Kurikulum Merdeka diterapkan dalam pelaksanaan pembelajaran dan asesmen, (2) Mandiri Berubah, berfokus pada pemanfaatan Kurikulum Merdeka untuk merancang kurikulum di setiap satuan pendidikan serta menjalankannya dalam kegiatan pembelajaran dan asesmen, serta (3) Mandiri Berbagi, tidak hanya menerapkan Kurikulum Merdeka dalam proses pengembangan kurikulum dan pelaksanaan pembelajaran serta asesmen, tetapi juga berkomitmen untuk membagikan praktik terbaik dengan lembaga pendidikan lainnya.

Struktur Kurikulum Merdeka dalam Sekolah Menengah Pertama (SMP) menetapkan target pencapaian pada Fase D mencakup tingkat kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Namun, terdapat dua pembagian untuk kerangka kurikulum dan beban belajar yaitu kelas 7-8 dan kelas 9. Mata pelajaran di kedua kelompok ini sama, tetapi dengan beberapa mata pelajaran dialokasikan secara berbeda dalam alokasi waktu. Sebagai contoh, pelajaran ilmu pengetahuan alam di kelas 7 dan 8 dialokasikan 144 jam pelajaran pertahun, namun di kelas 9 hanya dialokasikan 128 jam pelajaran pertahun.

Para stakeholder terutama guru dan kepala sekolah, memiliki dampak yang signifikan terhadap tingkat keberhasilan implementasi kurikulum karena pada akhirnya tergantung pada mereka untuk melaksanakan kurikulum secara efektif. Para guru harus dimotivasi oleh kepala sekolah mereka, yang berperan sebagai manajer dan pemimpin. Motivasi ini berupa dorongan yang muncul dari seorang guru dengan tujuan tertentu dalam pikirannya, baik secara sadar maupun tidak sadar (Abidin dkk., 2023, hlm. 25-30). Lebih lanjut, kepala sekolah memiliki peran

penting yang signifikan terhadap iklim sekolah dan anggota organisasi dengan meningkatkan persepsi lembaga pendidikan sebagai sebuah organisasi (Hermanu, 2022, hlm. 215-223).

Dalam kapasitasnya sebagai pemimpin sekolah, kepala sekolah bertanggung jawab secara menyeluruh dan mempunyai peran penting dalam meningkatkan kualitas sekolah yang ia pimpin (Kadarsih dkk, 2020, hlm. 194-201; Nani & Munipah, 2020, hlm. 214-224; Rizkiani & Salahuddin, 2020, hlm. 29-36). Keberhasilan sebuah sekolah sebagian besar bergantung pada posisi kepala sekolah, yang tidak diragukan lagi lebih penting daripada posisi guru, terutama berkaitan dengan proses belajar mengajar di kelas. Sudut pandang ini serupa dengan yang disampaikan oleh (Latifah, 2022, hlm. 175-183), yang mengemukakan bahwa peningkatan mutu pendidikan menjadi salah satu kewajiban utama kepala sekolah.

Keberhasilan sebuah sekolah ditunjukkan melalui gaya kepemimpinan kepala sekolah. Kepala sekolah yang cakap dapat menginspirasi profesionalisme tenaga pengajar dan tenaga pendukung, serta murid-murid yang berbakat secara intelektual dan warga sekolah untuk berkontribusi pada kemajuan sekolah. Dengan demikian, kepala sekolah bertanggung jawab atas implementasi yang efektif dari rencana pembelajaran mandiri ini, maka dari itu ia harus menjalankan tanggung jawab kepemimpinannya dengan sangat baik.

Nurhayati (Romadhon & MS, 2021, hlm. 479-489) mengemukakan proses kepemimpinan mencakup upaya seorang individu untuk memengaruhi anggota kelompok atau individu lain agar mereka melaksanakan tindakan tertentu demi mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dengan demikian, kepemimpinan diasumsikan dapat meningkatkan mutu pendidikan dengan memperbaiki kinerja bawahan melalui dorongan semangat dan gairah kerja, serta memberikan motivasi untuk melaksanakan tugas-tugas mereka.

Namun, ada beberapa tantangan dalam implementasinya, termasuk guru-guru yang merasa kesulitan untuk memahami perubahan terkait dengan Kurikulum Merdeka terutama dalam aspek perencanaan,

pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran. Tantangan perencanaan pembelajaran meliputi: (1) kesulitan dalam menginterpretasikan CP menjadi tujuan pembelajaran; (2) perbedaan karakteristik siswa dalam kelas; (3) Terdapat kekurangan dalam literatur yang tersedia terkait model pembelajaran yang bervariasi; (4) terbatasnya dukungan dari segi infrastruktur dan fasilitas yang tersedia; dan (5) materi pelajaran dan pengetahuan awal yang terbatas. Pelaksanaan pembelajaran terhambat oleh beberapa faktor, yaitu: (1) kurangnya komprehensi terhadap materi ajar yang disampaikan penguasaan materi pelajaran dalam konteks pengetahuan lain yang relevan; (2) terbatasnya kemampuan menanggapi pertanyaan pengantar secara efektif; (3) terbatasnya pemahaman terhadap psikologi peserta didik; dan (4) keterbatasan dalam kemampuan untuk menyampaikan pengetahuan menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dimengerti. Salah satu kendala utama dalam penilaian pembelajaran adalah (1) penilaian awal yang tidak tepat, (2) terbatasnya dalam kemampuan mengidentifikasi proses pembelajaran; dan (3) pemahaman yang terbatas mengenai konsep penilaian formatif. Di samping itu, beban kerja guru meningkat karena pendekatan pembelajaran yang lebih berpusat pada siswa, yang membutuhkan persiapan materi secara intensif.

Fitriyah dan Wardani (2022, hlm. 241) menyarankan bahwa solusi terbaik adalah mendorong para pendidik untuk berpartisipasi dalam seminar dan pelatihan yang akan meningkatkan pengetahuan dan membantu guru dalam menggunakan Kurikulum Merdeka. Rahayu dkk. (2021, hlm. 5767) juga menyampaikan solusi serupa, yaitu selain bergantung pada kebijakan dari pihak sekolah dan pemerintah, guru perlu bersikap mandiri dalam menghadapi berbagai permasalahan yang muncul. Hal ini penting karena guru berperan sebagai penghubung antara keinginan para tim penyusun kurikulum dan hasil implementasinya pada siswa.

Kepala sekolah dapat berkolaborasi dengan guru untuk memetakan beban kerja guru yang ada untuk mengatasi masalah peningkatan beban kerja guru. Upaya ini dapat dilakukan melalui analisis tugas serta tanggung jawab guru, jumlah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kegiatan,

dan sumber daya yang tersedia. Kepala sekolah memiliki kemampuan untuk memodifikasi beban kerja guru setelah melakukan analisis. Selain itu, dapat dilakukan dengan mendelegasikan tugas, menyederhanakan proses pembelajaran, atau menyediakan asisten pengajar.

Masalah pengelolaan pelaksanaan kurikulum adalah salah satu dari beberapa elemen yang akan memberikan dampak signifikan terhadap keberhasilan implementasi kurikulum. Penelitian yang dilakukan oleh Silver (2004, hlm. 13), menunjukkan implementasi kurikulum di sekolah dipengaruhi oleh inisiatif nasional, kebijakan, dan khususnya manajemen kebijakan sekolah. Namun, penelitian Newstead (1999, hlm. 150-157) mengungkapkan bahwa ketidaksiapan guru, kondisi kemampuan siswa, budaya sekolah, dan ketidakjelasan substansi kurikulum yang semuanya berdampak pada implementasi adalah penyebab utama hambatan implementasi kurikulum baru.

Salabi (2020, hlm. 7-9) menemukan bahwa faktor-faktor berikut memengaruhi efektivitas Kurikulum Merdeka: (1) perencanaan yang matang sangat penting untuk mencapai efisiensi penggunaan sumber daya; (2) kualitas dan kesesuaian konten kurikulum dengan kebutuhan dan potensi siswa juga memengaruhi efektivitas implementasi; (3) pemahaman, persiapan, dan kesiapan guru dalam mengimplementasikan Kurikulum Merdeka juga memengaruhi efektivitas implementasinya; (4) faktor lingkungan, seperti iklim dan budaya sekolah, juga berpotensi memengaruhi efektivitas implementasi kurikulum; dan (5) ketersediaan sumber daya, infrastruktur, dan dukungan pemerintah merupakan aspek utama yang mendukung keberhasilan implementasi kurikulum.

Munthe (2020, hlm. 276-278) mencantumkan faktor-faktor lain dalam penelitiannya, antara lain: (1) kemampuan kepala sekolah dalam memimpin dan mengelola lembaganya sesuai dengan tujuan dan sasaran kurikulum mandiri, (2) pengetahuan dan kemahiran guru dalam menciptakan, melaksanakan, dan menilai pembelajaran yang berpusat pada siswa, (3) kegiatan belajar siswa yang aktif, imajinatif, dan mandiri, serta sesuai dengan kemampuan dan potensinya, (4) fasilitas dan sumber daya

yang memadai dan menunjang pembelajaran, (5) komite sekolah yang membantu dan mendukung bagian dalam pengembangan sekolah, dan (6) kebijakan pemerintah yang konsisten dapat membantu dan mengawasi lembaga pendidikan.

Menurut penelitian Riska Rahmadani (2023) tentang Pelaksanaan Kepemimpinan Pembelajaran Kepala Sekolah dalam Implementasi Kurikulum Merdeka SMAN Kecamatan Koto Tangah, penilaian terhadap gaya kepemimpinan pembelajaran yang diimplementasikan oleh kepala sekolah menunjukkan hasil yang positif dan memuaskan, dengan perolehan nilai rata-rata sebesar 4,26 pada bidang penyusunan misi sekolah, pengelolaan pembelajaran, dan penciptaan lingkungan yang ramah.

Pentingnya kepemimpinan pembelajaran terhadap efektivitas implementasi kurikulum merdeka diperkuat oleh penelitian Putriyani Rachman (2023) yang berjudul skripsi “Pengaruh Kepemimpinan Pembelajaran terhadap Efektivitas Implementasi Kurikulum Merdeka Jenjang Sekolah Dasar se-Kecamatan Ciparay” yang membuktikan bahwa Kepemimpinan Pembelajaran berpengaruh terhadap efektivitas implementasi kurikulum merdeka di tingkat SD, hubungan antara variabel X dan Y menunjukkan nilai korelasi yang sangat kuat, dengan angka sebesar 0,534.

Berdasarkan kajian diatas, dapat dipahami bahwa kepemimpinan pembelajaran berpengaruh terhadap Efektivitas Implementasi Kurikulum Merdeka. Maka, peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kepemimpinan Pembelajaran terhadap Efektivitas Implementasi Kurikulum Merdeka Jenjang Sekolah Menengah Pertama se-Kota Cimahi.”

1.2. Batasan dan Rumusan Masalah

1.2.1. Batasan Masalah

Berdasar latar belakang yang telah diuraikan, cakupan penelitian ini akan difokuskan pada Pengaruh Kepemimpinan Pembelajaran terhadap Efektivitas Implementasi Kurikulum Merdeka Jenjang Sekolah Menengah Pertama se-Kota Cimahi.

1.2.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan, penelitian ini akan merumuskan masalah, sebagai berikut:

- a) Bagaimana kepemimpinan pembelajaran pada jenjang Sekolah Menengah Pertama se-Kota Cimahi?
- b) Bagaimana efektivitas Implementasi Kurikulum Merdeka pada jenjang Sekolah Menengah Pertama se-Kota Cimahi?
- c) Seberapa besar pengaruh kepemimpinan pembelajaran terhadap efektivitas Implementasi Kurikulum Merdeka pada jenjang Sekolah Menengah Pertama se-Kota Cimahi?

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam penelitian terdapat 2 kategori jenis tujuan yaitu tujuan umum dan tujuan khusus, yang diuraikan sebagai berikut:

1.3.1. Tujuan Umum

Penelitian ini bertujuan untuk menentukan apakah terdapat pengaruh kepemimpinan pembelajaran terhadap Implementasi Kurikulum Merdeka jenjang Sekolah Menengah Pertama se-Kota Cimahi.

1.3.2. Tujuan Khusus

- a) Tergambarkannya pengaruh kepemimpinan pembelajaran pada jenjang Sekolah Menengah Pertama se-Kota Cimahi.
- b) Tergambarkannya efektivitas Implementasi Kurikulum Merdeka pada jenjang Sekolah Menengah Pertama se-Kota Cimahi.
- c) Teranalisisnya kepemimpinan pembelajaran terhadap efektivitas Implementasi Kurikulum Merdeka pada jenjang Sekolah Menengah Pertama se-Kota Cimahi.

1.4. Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini mampu memberikan manfaat, antara lain sebagai berikut:

- a) Bagi sekolah, dapat menyediakan alternatif untuk mengevaluasi seberapa besar pengaruh kepemimpinan pembelajaran terhadap efektivitas Implementasi Kurikulum Merdeka.

- b) Bagi guru, dapat menjadi referensi untuk memperdalam wawasan dan pemahaman tentang pengaruh efektifitas Implementasi Kurikulum Merdeka yang dilakukan oleh kepala sekolah.
- c) Bagi peneliti, dapat memperluas wawasan pribadi mengenai pengaruh kepala sekolah dalam Implementasi kurikulum Merdeka dan memberikan rekomendasi untuk pengembangan studi lebih lanjut.

1.5. Struktur Organisasi Skripsi

BAB I Pendahuluan, merupakan bagian pertama dari skripsi yang memuat penjelasan mengenai pendahuluan. Bab ini mencakup latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta struktur organisasi skripsi.

BAB II Kajian Pustaka, berisi penjelasan yang relevan dengan topik atau isu yang dibahas dalam penelitian. Bab ini menyajikan kerangka berpikir yang menggambarkan proses pemikiran peneliti selama proses penelitian, tinjauan penelitian terdahulu serta hipotesis penelitian.

BAB III Metode Penelitian, berisi uraian terperinci tentang metode yang diterapkan dalam penelitian meliputi lokasi dan sampel penelitian, instrumen penelitian yang digunakan, prosedur pengumpulan data dan metode analisis data.

BAB IV Temuan dan Pembahasan, terdapat dua bagian utama, penyajian hasil penelitian yang diperoleh melalui pengolahan dan analisis data sesuai dengan fokus dan tujuan penelitian, serta pembahasan yang mendalam mengenai hasil analisis tersebut.

BAB V Simpulan, Implikasi dan Rekomendasi, menyajikan interpretasi dan makna dari hasil analisis temuan penelitian, serta memberikan saran atau rekomendasi sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian tersebut.